

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota kepolisian pada Polda Sumatera Barat, kasus penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu kasus yang banyak dilakukan di Kepolisian Daerah Negara Republik Indonesia, dimana hukuman bagi pelanggaran tersebut mulai dari teguran tertulis hingga penempatan di tempat khusus, dalam penerapannya penjatuhan hukuman disiplin seringkali belum efisien, Kepolisian Republik Indonesia masih menghadapi berbagai kekurangan dalam penegakan disiplin seperti kurangnya kesadaran disiplin, penyimpangan dalam penjatuhan hukuman, dan potensi penyalahgunaan wewenang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukuman disiplin pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dewasa ini jumlah kasus pelanggaran disiplin di Kepolisian Daerah Sumatera Barat tiap tahun justru meningkat, peningkatan pelanggaran diakibatkan oleh faktor personel itu sendiri dan tidak adanya kepastian mengenai tingkatan pelanggaran dan hukuman disiplin. Tidak adanya kepastian dalam perundang-undangan mengakibatkan penegakan disiplin kurang efektif. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bidpropam yaitu mitigasi pelanggaran disiplin, inspeksi mendadak, Operasi Giat Penegakan dan Penertiban Disiplin.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan penegakan peraturan disiplin Polri yaitu:

1. Bagi Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk terus melakukan upaya dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya disiplin Polri serta peninjauan terkait penyelesaian pelanggaran disiplin.
2. Bagi Lembaga legislatif, Agar perubahan mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia segera diterbitkan sehingga hukuman disiplin memiliki tingkatan hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, hal ini bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum dalam penegakan disiplin Polri dan mengurangi kemungkinan penjatuhan hukuman disiplin yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkatan hukuman disiplin Polri dapat dibagi menjadi ringan, sedang, berat.

